

Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja dan Politik serta Relevansinya Bagi Jemaat

¹Novallick Elungan, ²Roy Dekky Tamaweo

¹Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon

²Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Email: 1novallickjustin@gmail.com

Diterima tanggal: 23 November 2023, Disetujui Tanggal: 13 Januari 2024

ABSTRACT

This article discusses the relationship between church and politics through the views of John Calvin. This view emerged during Calvin's reformation of Geneva in 1536 and upon his return from Strasbourg to Geneva in 1541. The new life of the people of Geneva apart from the Roman Catholic Church and the Duke of Savoy required Calvin to organise Geneva's church government system. According to Calvin, church and politics are institutions established by God as external means. Calvin emphasised the separation between Church and Politics because both have different tasks, but they complement each other. In essence, Calvin holds the view that both church and politics are means established by God or what Calvin calls 'God's representatives' to regulate human behaviour in accordance with His will.

Keywords: Calvin; Church; Ministry; Politics

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai hubungan gereja dan politik yang diangkat melalui pandangan Yohanes Calvin. Pandangan ini muncul pada saat Calvin mereformasi Jenewa pada tahun 1536 dan sekembalinya dari strasbourg ke Jenewa di tahun 1541. Kehidupan masyarakat kota Jenewa yang baru terlepas dari Gereja Katolik Roma dan adipati Savoy mengharuskan Calvin untuk menata sistem pemerintahan gereja Jenewa. Gereja dan Politik menurut Calvin adalah sebuah institusi yang didirikan Allah sebagai sarana eksternal. Calvin menekankan keterpisahan antara Gereja dan Politik karena keduanya memiliki tugas yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Pada intinya, Calvin berpandangan bahwa baik gereja maupun politik, keduanya adalah sarana yang didirikan Allah atau yang Calvin sebut sebagai "wakil-wakil Allah" untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak-Nya.

Kata Kunci: Calvin; Gereja; Pelayanan; Politik

PENDAHULUAN

Politik adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi seseorang yang sering mengikuti perkembangan masalah di dalam Negara. Dalam mencari dan mencapai tujuan dalam perkembangan suatu negara, seringkali politik mengambil peranan penting untuk mengarahkan dan bahkan mengatur jalannya sebuah organisasi ataupun negara.¹ Pada dasarnya politik bukanlah bidang yang terlarang atau bidang yang berdampak negatif bagi para masyarakat. Melainkan, politik adalah dasar proses dalam menjalankan sistem pemerintahan. Politik menjadi salah satu bidang yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki dampak positif. Dampak politik hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti dalam hal kehidupan sosial masyarakat seperti pengambilan keputusan, demokrasi, kepekaan terhadap kondisi negara, dan memahami tentang bagaimana keputusan politik menentukan biaya hidup. Pengaruh politik bukan hanya mempengaruhi dalam kehidupan sosial, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dalam beragama. Selain itu, politik menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan kepada pemerintah dengan tujuan mengembangkan sistem pemerintahan agar lebih sistematis mengatur dan mengambil keputusan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan kata lain, eksistensi politik memiliki peranan yang signifikan dalam keteraturan sosial. Akan menjadi sebuah kebohongan jika ada yang mengatakan bahwa ada kelompok atau organisasi yang terlepas dari yang namanya politik.² hal ini juga termasuk dalam hubungannya dengan gereja. Hubungan gereja dan politik bukanlah suatu hal yang baru dalam pembahasan publik. Gereja memiliki peran dalam politik dengan mengemukakan ajaran-ajaran kekristenan kepada jemaat yang berpolitik. Kaitannya dengan hal ini, gereja harus mengintegrasikan iman dan respon sosial dalam konteks politik. Namun, gereja sering disalahgunakan oleh para oknum-oknum untuk kepentingan individu maupun kelompok. Perbedaan pandangan dan pemahaman jemaat terhadap hubungan Gereja dan Politik menjadi permasalahan di tengah-tengah jemaat GMIM Ekklesia Singkil Luar.

Realitas yang berkembang dalam dunia dewasa ini, politik yang tergambar dalam pemahaman masyarakat adalah sesuatu yang merugikan dan dilihat sebagai permainan dari para kaum elit.³ Berdasarkan pengamatan, jemaat menganggap bahwa tidaklah baik gereja berhubungan dengan politik. Jika gereja berhubungan dengan politik maka hasilnya adalah gereja diperalat oleh politik demi kepentingan individu maupun kelompok politik. Kurangnya pengajaran, pembinaan, dan kurangnya sosialisasi, membuat jemaat sering kali berasumsi bahwa jika Gereja dihubungkan dengan politik maka gereja hanya menjadi kendaraan politik dan menjadi tempat untuk mencari keuntungan individu maupun kelompok demi kekuasaan. Oleh karena itu menyikapi hal yang terjadi, maka penulis perlu membaca, mengkaji dan menganalisis secara dogmatis melalui pandangan Yohanes Calvin mengenai pemahaman jemaat GMIM Ekklesia Singkil Luar tentang hubungan gereja dan politik yang pada akhirnya

¹ Andheralvi Isaiah Lontoh, "Gereja Yang Memberdayakan: Teologi Politik Julianus Mojau dan John Howard Yoder Sebagai Sumbangsih Pemikiran Terhadap Paham Politik Warga Gereja Masehi Injili di Minahasa Terhadap Pengakuan Iman GMIM" (PhD Thesis, Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, 2023), 1, <https://katalog.ukdw.ac.id/8273/>.

² Lontoh, 1.

³ Andheralvi Isaiah Lontoh dan Kristi Esandra Tangel, "Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen," *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 97, <https://doi.org/10.46965/jtc.v7i2.2275>.

penulis dapat mengemukakan suatu makna yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membaca artikel ini.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini maka penulis memerlukan metode penelitian yang akan membantu penulis untuk mengkaji masalah yang akan di bahas, dan penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan langkah-langkah statistik, angka-angka, atau metode kuantitatif lainnya untuk memperoleh hasil penelitian.⁴

HASIL PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Calvin

Yohanes Calvin adalah seorang tokoh reformasi Protestan di abad pertengahan. Jean Cauvin atau Yohanes Calvin lahir di Noyon, perancis utara pada tahun 1509.⁵ Ketika Calvin masih berumur 11 tahun, tepatnya 21 Mei 1521 ia diberi jabatan keimanan Gesine setelah tuan Michel Courtin pensiun dari jabatan itu. Selain itu Calvin mendapatkan biaya studi, dan diberi kesempatan belajar di universitas.⁶ Tahun 1528, Calvin belajar hukum di Orleans dan Bourges mengikuti ambisi ayahnya yang menginginkan Calvin menjadi kaya dengan menekuni ilmu hukum dan mempraktekkan ilmu hukum. Dalam ilmu hukum Calvin mempelajari retorika Cicero, filsafat abad pertengahan, silogisme, dan studi filologi humanis dari Pierre de L'Estoile dan seorang pengacara humanis bernama Andre Alciati. Calvin juga menekuni Eksegesis pada saat ia mempelajari bidang hukum Romawi yang didasarkan pada pemapanan teks, interpretasi linguistic, pengetahuan kelembagaan, dan fakta-fakta peradaban. Calvin mulai menguasai tentang institusi pemerintahan penguasa, pernikahan, dan gereja setelah bidang studi yang ia tekuni mempengaruhi pemikirannya. Calvin mempelajari Bahasa Yunani dari seorang guru bahasa yunaninya Melchior Wolmer yang memiliki peran penting menolong Calvin dalam menganalisis dan mengkaji naskah perjanjian baru. Kemudian, Calvin menafsir Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Tafsiran itu pun ia berikan kepada gurunya itu.⁷ Tahun 1536, Calvin meninggalkan Basel dan melanjutkan pengembaraannya ke Italia, paris, dan Strasburg dengan mengambil jalan melalui Jenewa. Calvin diundang oleh Farel seorang pengkhottbah Injil sesampainya di Jenewa⁸ untuk membantu penerapan reformasi di Jenewa. Tahun 1535 pemerintah Jenewa memihak kepada gerakan reformasi setelah membebaskan diri dari Uskup Jenewa dan daerah Savoy.⁹

Di Jenewa Calvin mengawali karirnya sebagai reformator sebagai pengajar Kitab Suci, pengkhottbah dan masuk ke dalam bagian dari organisasi gerejawi di Gereja Jenewa dan kemudian diangkat sebagai Pendeta Kota oleh pemerintah Jenewa pada akhir tahun 1536.

⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 7.

⁵ Francois Wendel, *Calvin: Asal-usul dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya* (Surabaya: Momentum, 2010), 5–6.

⁶ Henny W. B. Sumakul, *Panggilan Iman Dalam Teologi Luther dan Calvin: Suatu Kajian Etika Social dan Politik Dalam Gereja Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 64–65.

⁷ Sumakul, 71.

⁸ Christiaan de Jonge, *Apa itu Calvinisme?* (BPK Gunung Mulia, 1998), 8.

⁹ T. H. L. Parker, *John Calvin: A Biography* (London: J. M. Dent & Sons Ltd. London, 1975), 57–59.

Untuk mengubah organisasi gereja pada awal tahun 1537, Calvin menyerahkan serangkaian artikel kepada dewan kota untuk dipakai sebagai dasar organisasi gerejawi yang baru dan diterima oleh dewan kota pada bulan Maret.¹⁰ Kemudian Calvin dan Farel mewajibkan seluruh penduduk untuk menandatangani surat pengakuan sebagai tanda bahwa mereka sadar akan iman dan pengakuannya. Hal ini ditentang oleh penduduk Jenewa. Di tahun 1538 orang-orang yang menolak pengakuan tersebut telah menguasai Dewan Kota sehingga Calvin dan Farel dilarang untuk berkhotbah di gereja Jenewa dan kemudian diusir dari Jenewa.¹¹

Bucer dan Capito mengundang Calvin ke Strasbourg untuk menjadi pendeta gereja Prancis di sana dan mengajar teologi.¹² Calvin menjadi pendeta di Strasbourg dari tahun 1539 hingga 1541, di mana ia bekerja sama dengan Bucer untuk menerapkan ide-ide yang sebelumnya gagal di Jenewa. Di Strasbourg, Calvin aktif dalam mempromosikan penggunaan nyanyian Mazmur dengan bantuan musisi terkenal seperti Clement Marot, Louis Bourgeois, dan Maitre Pierre. Selain itu, Calvin juga menikah dengan Idelette de Bure, seorang janda bangsawan. Pernikahannya berlangsung selama sembilan tahun, namun tragisnya, istri Calvin meninggal tanpa memberinya keturunan.¹³ Pada tahun 1541, Calvin dipanggil kembali oleh Jemaat Jenewa. Setelah kembali bekerja di sana, ia segera mulai merancang tata gereja baru yang dikenal sebagai *Ordonnances Ecclesiastiques* (peraturan-peraturan Gerejawi) pada tahun yang sama. Selama masa tinggalnya di Jenewa, Calvin memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan pengembangan gereja dan masyarakat kota tersebut.¹⁴ Pada tahun 1558, penyakitnya mulai memburuk. Pada tanggal 27 Mei 1564, Calvin meninggal dengan tenang, meninggalkan tugas berat kepada Theodorus Beza. Namanya diabadikan dalam sejarah sebagai pendiri gereja Calvinis yang terkenal di seluruh dunia.¹⁵

Perkembangan Pandangan Calvin Terkait Gereja dan Negara

Pandangan Calvin mengenai hubungan gereja dan negara dan mengenai peran gereja dalam masyarakat tidak terlepas dari realitas yang terjadi pada awal abad ke-16. Pada waktu itu, seluruh masyarakat Eropa (kecuali orang-orang Yahudi) merupakan anggota Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh paus. Pemerintah negara pun terdiri dari orang-orang Kristen. Gereja dan negara dianggap sebagai satu kesatuan, yang disebut "corpus Christianum" atau "tubuh Kristen". Gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran Agustinus dalam bukunya *De Civitate Dei* (Tentang Negara Allah). Situasi politik Jenewa saat kedatangannya pertama kali di tahun 1536 sangatlah mempengaruhi pandangan Calvin mengenai Gereja dan Negara. Disana terjadi pergolakan antara Pemerintah dengan Calvin dan Farel. Hal itu muncul akibat penolakan Calvin dan Farel terhadap otoritas pemerintah yang mengatur setiap urusan gereja. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana situasi politik Jenewa mempengaruhi pemikiran Calvin.

¹⁰ Wendel, *Calvin*, 44–46.

¹¹ F. D. Willem, *Riwayat Hidup Singkat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 51.

¹² Parker, *John Calvin*, 91–92.

¹³ Willem, *Riwayat Hidup Singkat*, 51.

¹⁴ Willem, 51.

¹⁵ Willem, 53.

Pada Musim semi 1536 kultur politik dimulai oleh orang-orang Jenewa dengan debat publik yang luas dan presentasi pengakuan Iman.¹⁶ Pada 16 Januari 1537 usaha Calvin dalam mereformasi Jenewa dimulai dengan menyerahkan Articles kepada berbagai Dewan kota yang berfungsi sebagai dasar bagi organisasi gerejawi yang baru.¹⁷ Usulan ini bermaksud memutuskan hubungan radikal dengan Gereja Katolik Roma. Di dalam Artikel ini terdapat usulan-usulan mengenai Perjamuan Kudus yang hendak dirayakan setiap minggu, pengucilan. Artikel yang lain mengusulkan tentang nyanyian Jemaat, pengajaran bagi kaum muda, formulasi pengakuan iman dan penghapusan larangan-larangan menikah oleh Paus.¹⁸ Tujuan dari penawaran Pengakuan Iman ini agar menjadi keharusan bagi penduduk Jenewa yang ingin tetap tinggal di dalam kota.¹⁹

Pada bulan Mei di tahun 1537 Articles yang Calvin dan Farel berikan kepada Dewan Kota diterima dan diikuti diterimanya Confession. Hak memberlakukan penandatanganan Confession kepada penduduk adalah sebuah kekeliruan karena kurangnya pengalaman politik dari Calvin dan Farel. Akibat hal itu, faksi katolik yang menentang faksi Reformed lambat laun pendukungnya semakin banyak dan oposisi semakin kuat. Hal yang sama juga terjadi di faksi reformed. Banyaknya faksi Reformed yang tidak menyetujui pemaksaan suatu disiplin karena menurut pemahaman mereka tidak sejalan dengan Injil. Kemudian, para Dewan yang pro kepada Calvin dan Farel mengalami penolakan yang sama dan ujungnya pada pemilihan Februari 1538 kemenangan mutlak diraih oleh pihak oposisi. Kaum Reformasi Radikal juga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi Calvin dan juga muncul seorang oposisi baru yaitu Carolin.²⁰ Ada kalanya Alkitab menggunakan istilah pencobaan dalam arti suatu ujian. Abraham diuji oleh Allah (Kej. 22:1 dst.) dan dengan satu atau lain cara semua orang percaya diperhadapkan pada cobaan dan ujian (mis., Yak. 1:2 dan 1Ptn. 1:6). Setiap pencobaan yang dari Allah selalu bersifat menguji manusia. Namun perlu diingat pencobaan yang datang dari Iblis adalah pencobaan yang dirancang untuk menggiring manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah memprakarsai pencobaan jenis ini (Yak. 1:13) “Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata: “Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab Allah tidak dapat dicobai, dan Ia sendiri tidak pernah mencobai siapa pun.

Kombinasi kekuasaan dari beberapa keluarga bangsawan sisa simpatisan katolik dan tekanan politik internal membuat Calvin dan Farel dibuang dari Jenewa ke Strasbourg. Theodore Beza, seorang penulis biografi Calvin beranggapan bahwa pembuangan Calvin ke Strasbourg ini menandakan Providensi Allah (Pemeliharaan Allah). Dengan pembuangannya ini untuk memperkuat pengalaman dan kemudian dipersiapkan untuk memperkuat kota-kota lain.²¹ Sesaat kembalinya Calvin di Jenewa, ia segera merancang tata gerejawi atau peraturan-peraturan gerejawi yang kemudian disahkan oleh sidang raya pada bulan November 1541.²²

¹⁶ David W. Hall, *Calvin di Ranah Publik* (Surabaya: Momentum, 2011), 63.

¹⁷ Wendel, *Calvin*, 44.

¹⁸ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 41.

¹⁹ Wendel, *Calvin*, 45.

²⁰ Wendel, 47.

²¹ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 64.

²² Jeffrey R. Watt, *The Consistory and Social Discipline in Calvin's Geneva* (New York: University of Rochester Press, 2020), 4.

Peraturan-peraturan yang dibentuk Calvin ini memberikan bentuk karakteristik dan identitasnya bagi gereja Jenewa.²³

Pada awal tahun 1542, Calvin telah mengonsepkan sebuah skema menyeluruh tentang tata kelola gereja, yang merupakan intisari dari pengalamannya sebagai pendeta di Jenewa dan Strasbourg, serta perenungannya atas Alkitab dan diskusi dengan para teolog dan organisator terkemuka pada zamannya. Calvin juga menekankan tentang disiplin gereja disana dengan membuat Konsistori. Konsistori Jenewa bukanlah sebuah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sekuler. Namun, mereka berkolaborasi dengan dewan kota, di mana semua anggota awam Konsistori juga merupakan anggota salah satu dari tiga dewan kota tersebut, yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman dunia. Sejak awal berdirinya, Konsistori Jenewa memberlakukan tiga jenis hukuman terhadap para pelanggar: teguran, pengucilan, dan merujuk mereka kepada dewan kota untuk hukuman pidana. Pada akhir tahun 1540-an, Konsistori Calvin juga dapat memerintahkan réparation, pengakuan dosa di depan umum di gereja, sebuah hukuman yang digunakan terutama untuk orang-orang yang melakukan kemurtadan di Prancis selama Perang Agama.²⁴

Pandangan Calvin tentang hubungan gereja dan negara telah ia uraikan dalam buku 4.20. Calvin memulainya dengan membedakan dua jenis pemerintahan bagi manusia.²⁵ Pemerintahan spiritual yang berkaitan dengan kehidupan kekal dan iman dalam Kristus. Ini disebut Kerajaan Rohani Kristus. Pemerintahan sipil yang berkaitan dengan keadilan dan moralitas kehidupan duniawi. Calvin membedakan keduanya, karena sama sekali memiliki sifat yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Namun, kebebasan spiritual dapat berada berdampingan dengan perbudakan sipil.²⁶ Pemerintahan sipil adalah bentuk kedua dari pemerintahan yang didirikan Allah dan yang diizinkan untuk menegakkan keadilan sipil dan moralitas.²⁷ Kekuasaan dari pemerintahan sipil sangatlah berbeda dengan gereja.²⁸ Calvin menolak pandangan dari kelompok Anabaptis. Calvin merasa bahwa mereka telah salah menafsirkan makna dari janji-janji tentang kebebasan yang telah diberikan oleh ajaran Kristen dan kesetaraan setiap orang di hadapan Kristus. Kelompok Anabaptis telah memberikan interpretasi yang keliru terhadap konsep kebebasan dan kesetaraan Kristen, yang menyebabkan mereka menyimpang dari ajaran yang sebenarnya.²⁹ Penolakan Calvin tersebut atas dasar pandangannya tentang pemisahan antara pemerintahan spiritual dan pemerintahan sipil, tetapi ia juga menyatakan bahwa keduanya tidak bertentangan melainkan "Pemerintah sipil memiliki tujuan yang telah ditetapkan, selama kita hidup di antara manusia, yaitu untuk menghargai dan melindungi ibadah lahiriah kepada Allah, untuk mempertahankan doktrin kesalehan yang sehat dan posisi gereja, untuk menyesuaikan hidup kita dengan masyarakat manusia, untuk

²³ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 255.

²⁴ R. Ward Holder, *John Calvin in Context* (Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 2020), 105.

²⁵ Charles Parte, *The Theology of John Calvin* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2008).

²⁶ Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, Kedua (Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2000), 1485–86.

²⁷ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 89.

²⁸ Donald K. McKim, *The Cambridge Companion To John Calvin* (Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 2004), 175.

²⁹ T. H. L. Parker, *CALVIN: An Introduction to His Thought* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995), 158.

membentuk perilaku sosial kita kepada kebenaran sipil, untuk mendamaikan kita satu dengan yang lain, dan untuk memajukan perdamaian dan ketenteraman umum." Calvin menolak pandangan bahwa kekristenan harus menghapuskan kebutuhan akan pemerintahan sipil. Justru pemerintahan sipil diperlukan selama manusia masih hidup di dunia ini sebagai pengembara menuju kehidupan kekal.³⁰ Baginya, tujuan dari adanya pemerintahan sipil untuk menjamin terpeliharanya kemanusiaan di antara manusia, dan mewujudkan agar agama publik dapat hadir di antara orang Kristen.³¹

Meskipun gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan, sementara negara bertanggung jawab atas perdamaian, keadilan, dan kebebasan, namun tidak ada pemisahan final antara keduanya. Hal ini karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas gereja dan juga negara. Dengan kata lain, meskipun terdapat pembagian tugas antara gereja dan negara, keduanya tetap berada di bawah kekuasaan tertinggi Yesus Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatu, baik gereja maupun negara. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan yang benar-benar final antara keduanya.³² Dengan menyebut bidang ini sebagai 'pertolongan', maka tatanan politik merupakan salah satu dari 'sarana lahiriah atau pertolongan yang melaluinya Allah mengajak manusia untuk bergabung dengan persekutuan Kristus dan memelihara mereka di dalamnya', sama seperti Gereja dan Sakramen-sakramen. Tatanan politik berperan sebagai salah satu sarana yang membantu manusia dalam perjalanan menuju kerajaan surgawi selama masih hidup di bumi sebagai peziarah.³³ Kemudian, Calvin dengan tegas menyampaikan dengan menghapuskan pemerintahan sipil dapat dianggap sebagai tindakan barbar yang tidak masuk akal. Pemerintahan sipil memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan kebutuhan dasar manusia seperti roti, air, matahari, dan udara. Pemerintahan sipil tidak hanya memastikan bahwa manusia dapat bernafas, makan, minum, dan tetap hangat, tetapi juga mencegah penyebaran penyembahan berhala, penodaan terhadap nama Tuhan, penistaan terhadap kebenaran-Nya, dan pelanggaran publik lainnya terhadap agama. Pemerintahan sipil mencegah gangguan terhadap ketertiban umum, melindungi hak milik setiap orang, memfasilitasi interaksi yang baik antar manusia, serta menjaga kehormatan dan kesopanan di masyarakat. Calvin menyatakan bahwa pemerintahan sipil memungkinkan adanya manifestasi publik dan memelihara kemanusiaan di antara manusia.

Pada awalnya Calvin menempatkan agama di luar keputusan manusia. "Karena, ketika saya membuktikan sebuah administrasi sipil yang bertujuan untuk mencegah agama yang benar yang terkandung dalam hukum Allah secara terbuka dan dengan penistaan publik dilanggar dan dicemari dengan kekebalan hukum, saya di sini, lebih dari sebelumnya, tidak mengizinkan orang untuk membuat hukum sesuai dengan keputusan mereka sendiri mengenai agama dan penyembahan kepada Allah." Meskipun pada awalnya terkesan bahwa Calvin menempatkan agama di luar keputusan manusia, dia sebenarnya mengizinkan pemerintahan sipil untuk menegakkan agama yang benar sesuai dengan hukum Tuhan dan mencegah penodaannya secara terbuka. Calvin mau menekankan peran penting pemerintahan sipil dalam melindungi agama, perdamaian, dan ketertiban masyarakat, serta mengatur hubungan antara pejabat

³⁰ Calvin, *Institutio*, 1487–1488.

³¹ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 89.

³² Parte, *The Theology of John Calvin*.

³³ Parker, *Calvin*, 158.

negara, hukum, dan rakyat.³⁴ Inti dari tujuan pemerintahan sipil adalah untuk melindungi integritas fisik dari subjek-subjeknya dan untuk memastikan legitimasi gereja.³⁵

Calvin membantah pandangan anarkis yang menolak otoritas pemerintah dan menyatakan bahwa bentuk pemerintahan oleh raja dan hakim sudah tidak relevan lagi setelah injil Kristus. Calvin mengutip beberapa ayat dari Alkitab yang mendukung keberadaan otoritas pemerintah dan raja sebagai pembela umat beriman dan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermoral dengan menyatakan bahwa "Karena ketika Daud mendorong semua raja dan penguasa untuk mencium Anak Allah (Mzm. 2:12), ia tidak meminta mereka mengesampingkan kekuasaan mereka dan mengundurkan diri ke dalam kehidupan pribadi, tetapi menyerahkan kepada Kristus kuasa yang telah diberikan kepada mereka, supaya Dia sendiri yang akan menaungi semua orang." Calvin menegaskan bahwa Alkitab tidak mengajarkan penghapusan kekuasaan raja dan penguasa, namun justru memerintahkan agar mereka tunduk kepada Kristus dan menggunakan kekuasaan mereka untuk membela gereja dan umat beriman. Dengan demikian, Calvin membantah pandangan anarkis dan membenarkan keberadaan otoritas pemerintah berdasarkan ajaran Alkitab.³⁶

Para pejabat harus menyadari bahwa mereka adalah wakil atau pelayan Tuhan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka harus menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian, ketekunan, dan ketulusan karena mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada Tuhan kelak. Tindakan mereka yang tidak adil dan curang bukan hanya menyalimi sesama manusia, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap keadilan dan kehendak Tuhan " Jika mereka ingat bahwa mereka adalah wakil-wakil Allah, mereka harus berjaga-jaga dengan penuh perhatian, kesungguhan, dan ketekunan, untuk mewakili diri mereka sendiri kepada manusia sebagai gambaran pemeliharaan, perlindungan, kebaikan, kebijakan, dan keadilan ilahi." Di sisi lain, mereka harus bangga dan mendapatkan kekuatan karena tugas mereka bukanlah perkara duniawi biasa, melainkan panggilan suci untuk mewakili Tuhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kesadaran ini seharusnya mendorong mereka untuk senantiasa bertindak dengan integritas tinggi dalam melayani Tuhan dan sesama manusia.³⁷

Menurut Calvin, mereka yang mengkritik dan mencemooh otoritas pemerintahan yang sah sama seperti mencemooh Tuhan sendiri, karena pemerintahan tersebut diangkat oleh Tuhan. Menentang pemerintah berarti menentang kekuasaan Tuhan atas diri mereka. Menurut Calvin, dalam kitab Roma, paulus mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari Tuhan " Sebagaimana Paulus juga menyatakan semuanya ketika ia mengatakan bahwa tidak ada kuasa selain dari Allah (Roma 13:1)." Calvin menemukan adanya perbedaan antara pelayanan rohani seperti para rasul dengan kekuasaan pemerintahan. Yesus tidak melarang para pengikut-Nya untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan raja dan pemerintahan merupakan ketetapan kebijaksanaan Tuhan. Alkitab memerintahkan umat untuk menghormati raja dan penguasa. Walaupun berbagai bentuk pemerintahan memiliki perbedaan, bagi Calvin semuanya harus dianggap

³⁴ Calvin, *Institutio*, 1488–1489.

³⁵ McKim, *The Cambridge Companion To John Calvin*, 175.

³⁶ Calvin, *Institutio*, 1490–1491.

³⁷ Calvin, 1491–1492.

sebagai ketetapan Tuhan. Bahkan kekuasaan monarki absolut yang tidak disenangi pada zaman dahulu pun diakui sebagai ketetapan ilahi.³⁸

KESIMPULAN

Calvin menjelaskan bahwa kedaulatan dan providensi Allah terjadi di tengah-tengah dunia ini lewat sarana eksternal yang dihadirkan Allah yaitu pemerintah gereja maupun politik yang Calvin anggap mereka sebagai wakil-wakil Allah. Ajaran ini sangat bertujuan untuk memahami bagaimana gereja dan politik bisa ada hubungannya. Lewat ajaran ini, makna teologis yang Calvin sajikan lewat pandangannya dapat menjadi dasar utama pengajaran bagi orang Kristen untuk memahami kebaikan Allah bagi manusia. Gereja adalah tempat pengudusan lewat pelayanan sakramen dan politik adalah tempat untuk mengatur suatu sistem pemerintahan yang dapat menegakkan keadilan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kerajaan spiritual maupun kerajaan duniawi sama-sama bertugas atas kendali Allah. Allah tidak menghendaki kedua entitas ini berperilaku sesuai dengan apa yang mereka mau, tetapi atas dasar apa yang telah Ia kehendaki kepada mereka.

LAMPIRAN PENELITIAN (opsional)

Pada tahun 1970, kolom 2 GMIM Betani Singkil Sindulang berubah menjadi kolom 7 dengan pimpinan kolom waktu itu ketua Bpk Drs. H. J. Sepang, sekretaris Bpk. M. Dorah da bendahara Bpk. J. S. Regar dengan penasehat Bpk. D.C.David. kemudian di akhir tahun 1970, kolom dimekarkan lagi menjadi 2 kolom yakni kolom 15 dan kolom 16 dengan 82 KK dengan ketua jemaat saat itu Pdt. M.D.V. Kandiyoh, S. Th. dan pada tahun 1982, kolom 15 dan kolom 16 dimekarkan lagi menjadi 5 kolom dengan 91 KK, yakni kolom 37, kolom 43, kolom 44, kolom 45, kolom 46 jemaat GMIM Betani Singkil Sindulang dengan ketua BPMJ waktu itu Pdt M.L. Rindengan. Kemudian, GMIM Ekklesia Singkil Luar ditetapkan sebagai gereja mandiri pada tanggal 27 Januari 1992 berdasarkan SK BPS No 22 tanggal 26 Januari 1992 dengan 5 kolom dan Pnt. Petrus Intama, BA sebagai ketua jemaat pertama. Pada Tanggal 5 November 2000 jemaat membangun gedung gereja baru dengan peletakan batu pertama oleh Bpk. Drs. Winsulangi Salindeho, dan dipimpin oleh Pdt. A. F. Parengkuan sebagai Ketua BPS GMIM. Kemudian, gedung gereja baru ditahbiskan pada tanggal 31 Januari 2010 oleh Sekretaris BPMS GMIM Pdt. Dr. Dekky Lolowang, M.Th. Di tahun yang sama dengan tahun ditahbiskan gereja Ekklesia, Jemaat Ekklesia dimekarkan menjadi 6 kolom. Pada tahun 2010, berdasarkan SK BPMS No.A.59, tanggal 1 November 2010, jemaat menerima kehadiran vikaris ibu Merke Warongan, S.Th (Ny. Liuw) yang kemudian pada tanggal 2 Desember 2012 diteguhkan menjadi Pendeta GMIM oleh Pdt Dr H. W. B Sumakul selaku wakil ketua bidang ajaran, penggembalaan dan pembinaan sinode GMIM, dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta sampai 1 Desember 2015. Pada tanggal 14 Juli 2019, Jemaat Ekklesia Singkil Luar menerima kehadiran Pendeta Jemaat, Pdt Sdr Christian Rindengan, M.Th.

Tabel Jadwal Wawancara

³⁸ Calvin, 1492–1493.

Nama Informan	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
Bpk. Jimmy Sulendorong	Februari 2024	Di rumah informan
Pdt. Ibu Hetty Caroles, S.Th.	Februari 2024	Di gedung gereja
Sdri. Indah Sasia, S.IP.	Februari 2024	Di ibadah pemuda jemaat
Sdri. Melany Macawalang, S.Ikom.	Februari 2024	Di ibadah pemuda jemaat
Pnt. Bpk. Christian Turangan, S.Pd.K.	Februari 2024	Di ibadah pemuda jemaat
Sdri Amelia Kendung	Februari 2024	Di ibadah pemuda dan remaja kolom 3
Sdr. Kristian Kasdi, SH.	Februari 2024	Di ibadah pemuda jemaat kolom 1
Pnt. Bpk. Octavianus Lolaroh	Februari 2024	Di ibadah kolom 2
Pnt. Bpk. Agus Mengko	Februari 2024	Di gedung gereja
Pnt. Ibu. Veronica Bomboa, S.Keb.	Februari 2024	Di gedung gereja

Ibu. Charissa Rompah, S.Ikom.	Februari 2024	Di rumah informan
Pnt. Bpk. Ivan David	Februari 2024	Di gedung gereja
Sdr. Ray David, SH.	Februari 2024	Di ibadah pemuda jemaat
Sdri. Gabriella Karepowan	Februari 2024	Di ibadah pemuda dan remaja kolom 5
Sdr. Alfito Tumade	Februari 2024	Di ibadah remaja jemaat

Adapun pertanyaan yang diberikan ada sepuluh pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang saudara ketahui tentang gereja?
2. Apa yang saudara ketahui tentang politik
3. Dari mana saudara mendengar istilah politik?
4. Menurut saudara apakah gereja boleh berpolitik?
5. Menurut saudara siapa yang boleh berpolitik?
6. Apakah ada hubungan antara gereja dan politik?

Pandangan para informan mengenai pengertian gereja dan politik sudah cukup baik. Mereka melihat gereja tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai persekutuan orang-orang percaya dan tempat transformasi spiritual. Hal ini menunjukkan pemahaman yang utuh tentang fungsi dan makna gereja. Definisi politik yang diberikan oleh para informan cukup beragam dan mencakup berbagai aspek, seperti lembaga negara, perolehan kekuasaan, penentuan tujuan negara, sistem pemerintahan, dan aspek moral dan etika. Ini menunjukkan bahwa para informan memiliki pemahaman yang cukup luas tentang politik dan mampu melihat dari berbagai sudut pandang.

Perbedaan pandangan tentang apakah gereja boleh berpolitik atau tidak mencerminkan kompleksitas isu ini. Mereka yang memperbolehkan gereja berpolitik dengan batasan tertentu menunjukkan keinginan untuk menjaga integritas gereja sambil tetap berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara yang menentang gereja berpolitik khawatir akan terjadinya penyimpangan dan perpecahan. Meskipun semua informan sepakat bahwa siapa saja boleh berpolitik, catatan-catatan yang diberikan seperti pentingnya melaksanakan politik dengan benar sesuai dengan hukum dan etika, serta untuk kesejahteraan bersama. Ini menunjukkan bahwa informan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi dari keterlibatan dalam politik.

Mengenai apakah gereja dan politik harus dipisahkan atau saling terkait mencerminkan kompleksitas hubungan keduanya. Mereka yang melihat adanya hubungan saling terkait menunjukkan keinginan agar gereja berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Sementara yang menginginkan pemisahan khawatir akan terjadi penyimpangan jika gereja terlalu terlibat dalam politik praktis.

Dokumentasi

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Kedua. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Hall, David W. *Calvin di Ranah Publik*. Surabaya: Momentum, 2011.
- Holder, R. Ward. *John Calvin in Context*. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 2020.
- Jonge, Christiaan de. *Apa itu Calvinisme?* BPK Gunung Mulia, 1998.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah. "Gereja Yang Memberdayakan: Teologi Politik Julianus Mojau dan John Howard Yoder Sebagai Sumbangsih Pemikiran Terhadap Paham Politik Warga Gereja Masehi Injili di Minahasa Terhadap Pengakuan Iman GMIM." PhD Thesis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2023. <https://katalog.ukdw.ac.id/8273/>.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, dan Kristi Esandra Tangel. "Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen." *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 96–111.
<https://doi.org/10.46965/jtc.v7i2.2275>.
- McGrath, Alister E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- McKim, Donald K. *The Cambridge Companion To John Calvin*. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 2004.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Parker, T. H. L. *CALVIN: An Introduction to His Thought*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995.
- . *John Calvin: A Biography*. London: J. M. Dent & Sons Ltd. London, 1975.
- Parte, Charles. *The Theology of John Calvin*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 2008.
- Sumakul, Henny W. B. *Panggilan Iman Dalam Teologi Luther dan Calvin: Suatu Kajian Etika Social dan Politik Dalam Gereja Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Watt, Jeffrey R. *The Consistory and Social Discipline in Calvin's Geneva*. New York: University of Rochester Press, 2020.
- Wendel, Francois. *Calvin: Asal-usul dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya*. Surabaya: Momentum, 2010.
- Willem, F. D. *Riwayat Hidup Singkat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.